

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Seiring perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik, sehingga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai alat pengendalian, evaluasi kerja, sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar- dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang berkualitas agar para pengguna laporan keuangan (pemangku kepentingan) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Jika laporan keuangan pemerintah buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik (pemerintah).

Penerapan akuntansi didalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (peraturan menteri dalam negeri atau permendagri No.59 Tahun 2007). Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan SAKD sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Ihsanti (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi aparatur merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SAP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah manusia (Indriasih,2014).

Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dalam rangka menciptakan *good governance* juga harus diikuti dengan sumber daya aparatur yang kompeten. Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, sering dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap). Aspek kualitas penataan personil tidak mengikuti prinsip "*the right man on the right place*" (Fikri et al, 2015). Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas sumberdaya aparatur yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan:2003).

Kualitas laporan keuangan adalah tingkat baik atau tidaknya suatu laporan atas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh SDM yang kompeten. Kompetensi SDM merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang yang bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. (Arman:2018).

Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan komponen penting bagi keberhasilan organisasi, tidak terkecuali organisasi disektor pemerintahan.untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang baik, dilakukan upaya dengan menerapkan aplikasi tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk

membangunkan jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu antar unit kerja.

Penerapan SAP yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai entitas pelaporan tentunya akan meningkatkan kelitas laporan keuangan, Menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan dari *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP, kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. (www.bpk.go.id/2022)

Kas Daerah Kabupaten OKI pada tahun 2021 tidak memiliki cadangan anggaran, Sekretaris Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) DPW Tingkat II Kabupaten OKI, Bagus Saputra menilai jika BPKAD Kabupaten OKI kurang profesional dalam mengelola keuangan daerah. Ia mengungkapkan bahwa Kepala Badan Pengelola Keuangan tidak memiliki inisiatif untuk menyelamatkan keuangan daerah, dalam hal ini pihak yang terkait lebih paham apa yang dibutuhkan daerah dan jumlah anggaran yang dimiliki daerah saat itu, dengan dasar itu BPKAD harus mengutamakan hal yang bersifat prioritas.

Prinsip fleksibilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan adalah cara jitu menyikapi kondisi saat ini, sesuai dengan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Menurutnya, pejabat/otorisasi BPKAD Kabupaten OKI dalam hal menentukan akses anggaran APBD ke sumber daya alam,

mengabaikan poin penting pada pasal 66 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan APBN dan APBD. (www.linksumsel.co.id/2022)

Tingkat pendidikan pegawai pada pemerintah Kabupaten OKI berada pada tingkat magister, sarjana, dan Diploma III. Sebagian pegawai di BPKAD Kabupaten OKI merupakan lulusan ekonomi pembangunan serta ada beberapa pegawai yang berlatar belakang akuntansi. Sebagian besar dari pegawai khususnya yang ditempatkan dibidang keuangan atau akuntansi sudah dapat menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca. Selain itu pegawai BPKAD juga sebagian besar sudah memahami peraturan dan ketentuan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah.

Namun masih terdapat beberapa masalah di BPKAD selaku bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKI dalam penempatan pegawai yang tidak berdasarkan keahlian masing-masing pegawai, dimana masih banyak pegawai BPKAD yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, seperti pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang ditempatkan dibagian umum dan administrasi, seharusnya ditempatkan dibidang keuangan/akuntansi sehingga menunjang kinerja pegawai khususnya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah kabupaten OKI, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan menjadi fenomena yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada OPD lain di Pemerintah Kabupaten OKI. Dengan adanya fenomena ini pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang akuntansi atau ekonomi tentunya tidak memahami Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan baik, hal ini akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga prinsip akuntabilitas dalam penerapan *good governance* akan sulit dicapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten OKI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI?
2. Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI?
4. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis hanya membatasi pembahasannya yaitu pada penerapan system akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI. Pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI tahun 2020-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pangaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI

4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik mengenai penerapan SAKD, kompetensi aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI
 - b. Sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti berikutnya
2. Secara Praktis

Memberi sumbangsih bagi pemerintah daerah, sebagai bahan masukan bagi OPD dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.